

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM**

#### **2.1. Kondisi Saat Ini.**

Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi : bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, politik, ketentraman dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, tetapi banyak pula tantangan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu masih diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

##### **2.1.1 Sosial Budaya dan kehidupan Beragama.**

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan berkaitan erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 21 Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin dari aspek jumlah dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti : pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
2. Jumlah penduduk Lampung pada tahun 2005 mencapai 6.983.700 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,07 %. Sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, penduduk usia kerja, dan rasio ketergantungan juga mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan tingkat ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja yang tidak atau dinyatakan belum bekerja mencapai 4,07% dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,67% (2003).

3. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi makin baik yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang terdiri atas Indeks Kelangsungan Hidup, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Daya Beli. Angka IPM Provinsi Lampung pada tahun 2002 sebesar 65,8. Pada tahun 2003 IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,00. Nilai ini diperoleh dari variabel Indeks Kelangsungan Hidup 68,70 : Indeks Pengetahuan 77,10; dan Indeks Daya Beli 52,30 (BPS, 2003). Sedangkan menurut data BPS tahun 2004, IPM Provinsi Lampung mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu menjadi 68,4 yang menggambarkan bahwa status pembangunan manusia berada dalam kategori menengah ke bawah.
4. Status kesehatan masyarakat Lampung dapat dicerminkan dari masih banyaknya penderita baru rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit tahun 2005 mencapai 197.712 orang, dengan kasus penyakit terbesar pada penderita penyakit diare, malaria klinis, dan TBC paru klinis, sedangkan angka kematian bayi di Provinsi Lampung pada tahun yang sama adalah 55 bayi per 1.000 kelahiran dan kematian balita 64 per 1.000 kelahiran hidup. Angka-angka ini masih cukup tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Disamping itu kekurangan gizi terutama pada balita masih menjadi masalah besar dalam rangka membentuk generasi yang maju dan sejahtera pada masa yang akan datang. Sebaliknya angka harapan hidup telah mencapai 66,2 tahun (2003). Pemakaian air bersih telah mencapai 75,82 dan penggunaan jamban sehat mencakup 65,71 (2005). Keluarga berencana tercatat dari 1.380.636 pasangan usia subur (PUS) terdapat 961.460 (69,64%) aktif menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi.

5. Kondisi kesejahteraan masyarakat Lampung dilihat melalui angka kemiskinan di daerah Lampung pada tahun 2001 sebesar 31,25% dengan laju pertumbuhan penduduk miskin sebesar 4,09%, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk miskin pada periode tahun 1996-1999 sebesar 5,96%, sehingga laju pertumbuhan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk Lampung menjadi -3,76% pada tahun 2001. Perkembangan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera dilihat melalui Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPS AE) pada tahun 2000 sebanyak 443.916 KK (28,71%) dan pada tahun 2003 menjadi 485.481 KK (29,13%), sedangkan pada tahun 2004 sebesar 510.885 KK (29,92%), jumlah Keluarga Pra Sejahtera Non Alasan Ekonomi (KPS NAE) tahun 2000 mencapai 135.405 KK (8,76%), dan tahun 2003 menjadi 149.514 KK (8,97%), sedangkan tahun 2004 sebesar 152.276 KK atau 8,92%, Jumlah Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KSI AE) tahun 2000 dilaporkan sebesar 284.941 KK (18,43%), dan berubah menjadi 298.626 KK (17,92%) pada tahun 2003, serta menjadi 309.009 KK (18,10%) pada tahun 2004 dan jumlah Keluarga Sejahtera I Non Alasan Ekonomi (KSI NAE) tahun 2000 sebesar 188.965 KK (12,22%) dan 215.308 KK (12,92%) pada tahun 2003, serta menjadi 213.182 KK (12,48%) pada tahun 2004.
6. Taraf pendidikan penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang tercermin dari tingkat melek huruf yang terus meningkat. Demikian pula angka partisipasi sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun mengalami peningkatan, sedangkan angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-15 tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah pada sekolah lanjutan tingkat atas. Data tahun 2005 tercatat APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100%; yang berarti bahwa seluruh anak umur 7-12 tahun sudah dapat mengikuti pendidikan di sekolah, kelompok umur 13-15 tahun

sebesar 87%; yang diharapkan pada tahun 2009 seluruhnya telah mengikuti pendidikan di sekolah dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 48,16%, yang diharapkan pada tahun 2005 seluruhnya sudah mengikuti pendidikan di sekolah. Di tingkat pendidikan tinggi, jumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan program studi sangat memadai; meskipun masih terdapat disparitas yang tinggi antar perguruan tinggi, khususnya dalam kualitas proses pembelajaran.

7. Pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum merata disemua bidang pembangunan. Karir perempuan cukup maju (birokrasi dan legislatif serta di lembaga Sosial Masyarakat). Partisipasi pemuda dalam pembangunan juga makin membaik terutama dengan berkembangnya budaya olahraga, organisasi, dan partisipasi politik pemuda.
8. Taraf kesejahteraan masyarakat makin membaik, karena berbagai upaya pemberdayaan wanita melalui pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pencandu narkoba.
9. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya, misalnya kolaborasi antara tari Lampung dengan tari Bali yang disebut tari *Bala*. Disisi lain upaya pembangunan jati diri masyarakat Lampung seperti penghargaan pada nilai budaya lokal Lampung (*fiil pasangiri*) dan bahasa daerah Lampung, nilai solidaritas sosial,

kekeluargaan, serta rasa cinta tanah air dirasakan mulai memudar. Ini antara lain karena kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepat menyerapnya budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya lokal, serta tidak meratanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

10. Pembangunan bidang agama menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang dapat dilihat pada terciptanya kondisi kehidupan umat beragama yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi baik intern umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah (trilogi kerukunan). Kondisi trilogi kerukunan yang mantap merupakan pra kondisi yang tahan, mantap dan kondusif dan dapat dijadikan modal dasar dan penting sebagai daya dukung strategis pembangunan daerah Lampung. Kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah, lembaga pendidikan agama dalam semua jenjang, satuan dan jenis, menciptakan pembinaan berkesinambungan untuk memelihara kerukunan hidup beragama, agar terhindar dari isu-isu koflik bernuansa SARA; dan memfasilitasi kegiatan umat beragama dalam rangka peningkatan nilai-nilai iman dan taqwa. Tahun 2005 jumlah masjid 8.273, musholla 13.319, Gereja Protestan 707, Gereja Khatolik 601, Pura 786, Wihara 260. Pertumbuhan pemeluk agama berkembang linier, Islam 6.331.517, Kahtolik 117.735, Kristen Protestan 128.595, Hindu 197.995, dan Budha 117.186 orang. Bantuan-bantuan langsung untuk mendukung kegiatan Ormas-ormas keagamaan secara rutin telah diberikan. Jumlah lembaga pendidikan jenis keagamaan (khususnya Islam) hingga tahun 2005 tercatat : MIN/MIS 686, MTsN/MTsS 491, MAN/MAS 162, dan Pondok Pesantren 460.

### 2.1.2 Ekonomi

1. Kondisi perekonomian Lampung yang cukup kondusif pada tahun-tahun sebelumnya mendorong perkembangan investasi yang mengakibatkan perekonomian Provinsi Lampung dengan migas mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% pada tahun 2004 dan 3,76% pada tahun 2005. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,07%, menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Sektor primer masih dominan dalam perekonomian Provinsi Lampung. Produksi tanaman pangan utama (padi, jagung, ubikayu) masing-masing mencapai 2.129.914 ton GKG, 1.183.982 ton pipilan kering, dan 5.499.403 ton umbi basah; sedangkan nenas mencapai 3.042.155 ton/tahun terbesar di Indonesia. Kopi Lampung sudah dikenal di dunia, tetapi produktivitas kopi Lampung rata-rata hanya 800 kg/ha. Komoditas ekspor di daerah Lampung umumnya berasal dari produk-produk pertanian serta perikanan seperti kopi, udang segar, lada, damar, pisang segar, gaplek, biji kakao, dan sebagainya. Sedangkan ekspor hasil produk industri daerah antara lain nenas kaleng, monosodium glutamat, *particle board*, gula tetes, minyak sawit, kayu lapis, karet, kopi bubuk, dan lain sebagainya. Sedangkan impor didominasi oleh impor kimia, mesin-mesin dan biji-bijian yang secara umum merupakan bahan baku kegiatan industri dan pertanian daerah.
2. Realisasi investasi PMDN tumbuh dengan laju 11,45% dengan nilai 10,5 Triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMA mencapai 824 juta US\$. Proporsi realisasi dari rencana investasi PMDN mencapai 73%, sedangkan realisasi dari PMA hanya berkisar 33%. Ini menunjukkan bahwa investor di Provinsi Lampung sebagian berasal dari penanam modal dalam negeri. Pada sisi lain, hal ini

juga memberikan gambaran masih adanya kendala bagi investor asing untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2006 PAD Lampung mencapai Rp. 479,8 Miliar. Kapasitas fiskal daerah Lampung juga terus meningkat. Tahun 2006 kapasitas fiskal mencapai Rp. 1,06 Trilliun, sedangkan dana perimbangan pada tahun 2006 mencapai Rp 581,71 Miliar (DAU dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak SDA). Pada tahun-tahun mendatang, dengan semakin meningkatnya PAD, maka peranan DAU terhadap kapasitas fiskal daerah diperkirakan akan semakin menurun.
4. Provinsi Lampung merupakan wilayah pertanian. Ketahanan pangan telah memadai pada periode 1995-2005 dengan stok surplus untuk cadangan beras berada pada kisaran 89 ribu - 380 ribu ton. Produktivitas padi sawah berkisar 4,3 - 4,5 ton GKG/Ha, produktivitas jagung pada kisaran 2,2-3,3 ton pipilan kering/Ha, dan ubikayu berkisar 20-35 ton umbi basah/ha. Meskipun cenderung menurun, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB (atas dasar harga berkala) dalam periode 2000-2004 masih tetap paling besar, yaitu berkisar 45,30% (2000) - 38,59% (2004). Provinsi Lampung juga dikenal sebagai produsen sapi potong utama di Indonesia dengan populasi sapi mencapai 394.591 ekor. Produksi udang Lampung terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30% dari total ekspor udang nasional. Meskipun Provinsi Lampung juga dikenal dengan lada hitam, namun saat ini komoditas tersebut semakin terpuruk. Hasil hutan di daerah ini yang menonjol adalah damar "Mata Kucing" dengan target pasar ekspor yang semakin meningkat.

5. Provinsi Lampung mempunyai potensi sumber daya pesisir pantai dan perairan laut yang besar, tetapi belum didayagunakan secara maksimal, kecuali pertambakan, sehingga secara keseluruhan belum memberikan kontribusi yang menonjol pada perekonomian Lampung.
6. Provinsi Lampung memiliki industri yang dominan berkembang, yaitu pengolahan hasil pertanian (agro industri). Pada tahun 2004 terdapat 54.296 buah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 341.540 orang. Nilai investasi yang ditanamkan mencapai 4,33 Triliun rupiah dengan nilai produksi 7 Triliun rupiah, perkembangan ini didukung pula oleh pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang mencapai 2.714 buah dengan jumlah anggota mencapai 800 ribu orang. Modal sendiri yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari 18 Miliar rupiah, sedangkan modal dari luar 60 Miliar rupiah. Dengan kondisi ini menghasilkan nilai impor non migas mencapai 103 juta US\$, sedangkan nilai ekspor mencapai 1.098 juta US\$ berarti menghasilkan nilai surplus 994 juta US\$.
7. Provinsi Lampung mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan Kepariwisata seperti wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata kuliner, dan sebagainya. Pengembangan kepariwisataan Lampung belum maksimal, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Lampung.
8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah banyak menerbitkan surat keputusan hak atas tanah. Penerbitan sertifikat hak milik terbesar terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 37.010 bidang dengan luas mencapai 14.696 Ha. Penerbitan sertifikat HGB terbesar terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 103 bidang dengan luas lebih dari 33 Ha. Penerbitan sertifikat HGU terbesar terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 10 bidang dengan luas



hampir sekitar 12 ribu Ha. Penerbitan sertifikat hak pakai terbesar terjadi pada tahun 1999, yakni sebanyak 153 bidang dengan luas 243 Ha.

9. Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari indikator kesejahteraan yang ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang bersifat makro dari BPS. Angka kemiskinan di daerah Lampung mengalami fluktuasi yang tidak kita harapkan, pada tahun 2001 sebesar 31,25%, menurun pada tahun 2003 menjadi 29,13%, dan meningkat kembali pada tahun 2004 menjadi 29,92%. Ini menunjukkan keharusan adanya kegiatan atau perlakuan-perlakuan khusus yang harus dilakukan untuk mencegah kemiskinan penduduk yang semakin meningkat.

### **2.1.3 Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni**

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan IPTEKS di Provinsi Lampung tidak mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada kemampuan pengembangan dan penguasaan IPTEKS yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian daerah dan perguruan tinggi. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi belum banyak dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat nasional.
2. Pengembangan dan penguasaan IPTEKS terkendala oleh tidak tersedianya dana yang memadai untuk kegiatan tersebut. Belum banyaknya para peneliti terutama dari perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang mampu bersaing untuk memperoleh dana dari sumber dana di luar instansinya masing-masing, khususnya kegiatan dalam penelitaian IPTEKS dan rekayasa sosial terapan yang bisa diaplikasikan oleh industri dan masyarakat lokal. Untuk

itu perlu adanya kebijakan penelitian pengembangan dan penerapan IPTEKS lokal oleh pemerintah daerah yang didanai oleh pemerintah daerah.

3. Pengembangan seni, baik tradisional maupun modern belum mendapatkan proporsi yang memadai, baik dalam pembiayaan dan penyediaan sarana/prasarana, dan pengembangan sumber daya manusianya.

#### **2.1.4 Sarana dan Prasarana**

1. Kondisi sarana dan prasarana di Provinsi Lampung saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah.
2. Infrastruktur pengairan terutama jaringan irigasi, kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luas 1000 s/d 3000 ha atau daerah irigasi kecil lintas Kabupaten/Kota. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi mencapai luas 29.737 Ha, yang berada pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Seputih, Sekampung Mesuji Tulang Bawang, dan semangka. Provinsi Lampung juga memiliki Daerah Irigasi (DI) Sekampung Sistem, yang meliputi : DI Sekampung, DI Punggur Utara, DI Batanghari Utara, dan DI Raman Utara, yang kondisinya banyak mengalami kerusakan. Pada DI Sekampung kerusakan meliputi saluran sepanjang 8.550 m, 130 pintu air, dan 67 buah bangunan, pada DI Batang Hari Utara kerusakan meliputi: saluran sepanjang 209 m, 442 buah pintu air; dan 172 buah bangunan, pada DI Way Rarem meliputi : saluran sepanjang 2500 m, 79 buah pintu air, dan 15 buah bangunan.

Kondisi jaringan tersier yang airnya terjamin umumnya dalam kondisi baik, Namun tetap petak tersier yang kurang cukup mendapatkan air, umumnya mengalami kerusakan dengan proporsi rata-rata mencapai sekitar 30%. Pengembangan prasarana penampungan air, seperti waduk, embung, danau dan situ belum memadai, sehingga perlu diwaspadai penyediaan air terutama pada musim kemarau yang cenderung makin panjang untuk kebutuhan pertanian, industri, dan rumah tangga, agar tidak terjadi krisis air.

3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Panjang ruas jalan nasional di Provinsi Lampung pada tahun 2004 (SK Menteri Kimpraswil No. 376/KPTS/M/2004) adalah 1.004,16 km. Pada tahun 2005 dilakukan pembangunan jalan nasional baru yaitu ruas jalan Lintas Pantai Timur sepanjang 131,96 Km. Jadi, panjang ruas jalan nasional pada tahun 2005 mencapai 1.136,11 Km. Jalan provinsi mencapai 2.369,97 Km (SK Mendagri No.55 Tahun 2000). Panjang ruas jalan nasional dan provinsi di Provinsi Lampung adalah 3.506,08 Km. Tingkat kemantapan pelayanan jalan untuk jalan Nasional di Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2005 berkisar 75,5% dan Jalan Provinsi 60,75%. Kerusakan jalan persentasenya setiap tahun cenderung meningkat.
4. Infrastruktur Permukiman Perkotaan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi daerah, faktor sosial budaya lokal, kondisi prasarana dasar wilayah, serta pengaruh berbagai faktor eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan adanya suatu sistem penataan ruang yang komprehensif. Sistem tersebut meliputi berbagai tahapan dari proses pengembangan wilayah, yakni : perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang

bertempat tinggal di ruang yang nyaman dan lestari. Melalui penataan ruang yang baik, maka hak seseorang (property right) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreativitasnya.

5. Perhubungan Darat Provinsi Lampung memiliki satu terminal tipe A, yaitu Terminal Rajabasa yang berada di Bandar Lampung. Terdapat jalur kereta api yang merupakan bagian dari jaringan jalan KA Sumatera Selatan, yang melintasi 1 kota dan 5 kabupaten di Provinsi Lampung. Volume rata-rata layanan angkutan penumpang pada kereta api selama lima tahun terakhir mencapai 354.898 orang/tahun, dan angkutan barang mencapai 581.203 ton/tahun. Khusus untuk angkutan batubara, rata-rata baru mencapai 6,5-7 juta ton/tahun, yang masih jauh dari target yaitu 12 juta ton/tahun. Ini diakibatkan karena jalur KA yang ada masih merupakan jalur tunggal (single track) dan berlangsung secara bergantian dengan angkutan penumpang.
6. Infrastruktur Perhubungan Laut dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang, khususnya antar pulau dalam provinsi. Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan yang meliputi pelabuhan umum, baik yang dikelola secara komersial oleh PT Pelindo II Persero maupun yang dikelola untuk kepentingan swasta atau BUMN. Pelabuhan terbesar adalah Pelabuhan Panjang yang bertaraf Internasional, yang melayani trayek dalam negeri (inter island), meliputi : Bengkulu, Sumatera Selatan, Jakarta, Surabaya dan Palembang. Sementara trayek dan luar negeri (ocean going), meliputi : Timur Tengah, Singapura, Vietnam dan Malaysia, Pelabuhan Panjang akan dikembangkan untuk memenuhi persyaratan ISIMPANGS code dan menjadikan pelabuhan internasional dalam skala yang lebih besar.
7. Infrastruktur Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pelabuhan Bakauheni merupakan lintas penyeberangan

antarprovinsi yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api antarprovinsi. Pelabuhan Bakauheni masih dapat dikembangkan lebih lanjut karena saat ini fasilitas yang digunakan baru mencapai 25%. Operasi pelayanan angkutan penyeberangan Bakauheni-Merak berjalan 24 jam setiap hari dengan kemampuan rata-rata pelayaran kapal adalah 24 trip/hari. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000-5.000 GRT dan mempunyai daya angkut penumpang 379-1.900 orang dan kendaraan 45-200 unit. Selain itu juga terdapat Kapal Cepat yang berkapasitas 123-218 penumpang dengan waktu tempuh 45 menit.

8. Infrastruktur Perhubungan Udara. Provinsi Lampung memiliki prasarana transportasi udara sebanyak 7 Bandar Udara, terdiri dari 1 Bandar Udara Umum, 2 Bandar Udara Militer dan 4 Landasan Udara Khusus yang dimiliki swasta. Bandar udara militer di Provinsi Lampung adalah pusat pelatihan tempur angkatan darat di Way Tuba dan pusat pelatihan tempur angkatan udara di menggala. Bandar udara umum yang melayani angkutan penumpang umum adalah Bandara Radin Inten II yang terletak di Branti, Lampung Selatan, yang melayani rute penerbangan dari/ke Jakarta dengan frekuensi rata-rata 4 kali/hari (8 gerakan/hari). Jumlah penumpang pesawat udara pada tahun 2005 mencapai 96.577 orang. Bandara Radin Inten II mempunyai kemampuan untuk melayani pesawat B-737 seri 200 dan 300 atau sejenisnya, dengan klasifikasi Runway Instrumen Non Precision. Adapun Landasan Udara Khusus yang dimiliki swasta yaitu : Air Strip PT. Sumber Indah Perkasa (Mesuji), Air Strip PT. Gunung Madu Plantation (Gunung Sugih), Air Strip PT. Nusantara Tropical Fruit (Sukadana) dan Air Strip PT. SAC

(Blimbing). Landasan Khusus milik swasta kegunaannya untuk kepentingan perusahaan.

9. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi kepada masyarakat diselenggarakan oleh BUMN, yaitu PT Pos Indonesia dan PT Telkom, sedangkan Dinas Perhubungan melakukan perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Jumlah kantor pos yang ada sebanyak 103 unit, terdiri atas : Kantor Pos kelas III dan IV sebanyak 2 unit, serta Kantor Pos kelas VI dan VII sebanyak 4 unit. Sisanya berupa Kantor Pos Desa yang tersebar di seluruh wilayah sebanyak 5 unit. Jumlah fasilitas telekomunikasi yang ada saat ini adalah : Sambungan Telepon 26 STO; Telepon Selular 3 Operator (Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki 144 BTS dengan 282.897 pelanggan; Wartel 2.095 unit; Perusahaan Jasa telepon 43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota; serta IKR/G 2 penyelenggara.
10. Penyediaan Energi Listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua unit organisasi PT PLN (Persero), yaitu : PT PLN (Persero) Wilayah Lampung dan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sektor Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 1.584,6 MW. Beberapa pembangkit yang berlokasi di provinsi Lampung yang mampu mensuplai daya sebesar 186,73 MW. Sampai saat ini terdapat 1.356 desa yang telah mendapat pelayanan listrik dan 690 desa masih belum terlayani (33,72%). Terdapat potensi pembangkit energi belum dikembangkan, yakni meliputi : energi panas bumi, potensi pasang surut dan gelombang laut, angin, mikrohidro serta panas matahari.

### 2.1.5 Politik.

1. Perkembangan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari perkembangan aktivitas masyarakat melalui organisasi politik. Pada tahun 2004, terdapat paling tidak 65 Partai Politik terdaftar dengan potensi sumber daya manusia dan kekuatan potensial yang beragam, tetapi hanya 24 Partai Politik yang berhasil mengikuti Pemilu 2004. Berdasarkan hasil Pemilu 2004. Beberapa partai politik meraih perolehan kursi terbanyak di legislatif (DPRD provinsi Lampung), yaitu : Partai Golkar (16 kursi), PDIP (13 kursi), PKB (6 kursi), PKS (6 kursi), Partai Demokrat (6 kursi), PAN (6 kursi), Partai Bintang Reformasi (4 kursi), PPP (4 kursi), PKPB (3 kursi) dan PPDK (1 kursi). Pada tingkat DPR RI, wakil dari Provinsi Lampung sebanyak 17 orang di DPR dan 4 orang di DPD.
2. Secara umum kondisi politik telah berkembang sangat dinamis dan semakin demokratis. Anggota DPRD Provinsi Lampung dan DPR-RI daerah pemilihan Lampung telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan membawa berbagai aspirasi ataupun menerima aspirasi masyarakat, baik di Gedung DPRD ataupun di berbagai lokasi lainnya. Mulai periode 2004-2009, DPRD Provinsi Lampung telah mengembangkan sistem penjaringan aspirasi masyarakat dengan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
3. Dinamika masyarakat Lampung juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 69 buah. Perkembangan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan/LSM saat ini semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta semakin menunjukkan

kedewasaan dalam berorganisasi. Ini terlihat melalui hubungan interaksi organisasi dengan masyarakat, baik dalam penyerapan aspirasi maupun dalam advokasi dalam menyampaikan aspirasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pelayanan publik. Dinamika kegiatan ormas dan LSM juga diperlihatkan dengan berfungsinya kontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah maupun DPRD.

4. Dalam rangka mendorong dan menjaga iklim politik serta memantapkan budaya politik menuju demokratisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut : melaksanakan dialog politik; sarasehan dan dialog antargenerasi; meningkatkan wawasan gender dan bahaya narkoba bagi organisasi kewanitaan; membentuk Forum Komunikasi Politik; melaksanakan pembaruan; dan memfasilitasi berbagai kegiatan LSM.

#### **2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban**

1. Sebagai daerah yang mempunyai karakter majemuk secara sosial budaya, Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik, meskipun dalam skala yang tidak besar. Latar belakang pemicu konflik cukup beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, maupun SARA. Beberapa konflik yang pernah mencuat ke permukaan, antara lain : kasus Way Jepara; Padang Ratu; daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung Utara; Way Kanan; Tulang Bawang; Lampung Tengah; Lampung Timur; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi.
2. Pasca krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, di Provinsi Lampung juga terjadi kerawanan sosial. Terjadinya PHK secara massal telah menyebabkan timbulnya pengangguran dan kembalinya



pekerja urban dari kota ke desa. Kondisi ini menyebabkan tumbuhnya kerawanan di berbagai pelosok desa karena secara psikologis, penduduk urban yang kembali ke desa merasa lebih mengetahui dari penduduk desanya dan secara tidak langsung menciptakan situasi yang kurang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebab kerusuhan yang sangat kecil sekalipun akan sangat mungkin mencuat menjadi permasalahan yang besar karena kompleksnya masalah dan himpitan ekonomi.

3. Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah tingkat upaya pemberantasan penyalagunaan psikotropika dan Napza. Pada tahun 2004 telah terjadi penurunan kasus sebesar 31,1% dari tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait. Penurunan berbagai kasus tindak pidana lain juga diwujudkan melalui operasi terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian di Provinsi Sumsel, Banten, dan Jakarta.
4. Meskipun angka Crime Index masih cukup tinggi, namun secara umum dapat dikatakan bahwa stabilitas daerah cukup terjamin. Ini dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya konflik sosial. Penurunan konflik sosial ini sekaligus sebagai bukti dari keseriusan upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat, adat, dan agama, dalam bentuk silaturahmi dan sosialisasi dalam rangka pengutan persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI.
5. Dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan terorisme, maka telah diambil langkah-langkah berikut : melaksanakan koordinasi untuk antisipasi terhadap potensi atau perkembangan terorisme; meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap

ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum; sosialisasi mengenai perkembangan serta bahaya terorisme serta meningkatkan peran komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Lampung;

6. Dalam rangka mencegah perkembangan penyalahgunaan NAPZA telah dilakukan sosialisasi bahaya NAPZA dan memfungsikan *Seaport Interdiction* di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu upaya untuk memutus jaring peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi Lampung.

#### **2.1.7 Hukum dan Aparatur**

1. Pada era reformasi, berbagai produk hukum cenderung diabaikan karena dianggap penyusunannya berpihak kepada pemerintah dan pengusaha serta tidak berpihak kepada rakyat. Disamping itu sebagai dampak euforia demokrasi, terdapat indikasi bahwa para penegak hukum kehilangan kewibawaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga masyarakat menyelesaikan masalah hukum dengan caranya sendiri.
2. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan dengan peraturan yang sederajat atau dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini terjadi karena perumusan perundang-undangan yang kurang jelas sehingga menimbulkan banyaknya interpretasi, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dan sulit untuk diterapkan. Dengan demikian diperlukan adanya upaya untuk pembenahan sistem hukum, khususnya produk hukum daerah, sehingga mampu menghasilkan produk hukum daerah yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3. Pemerintah Provinsi Lampung terus-menerus melakukan penyempurnaan terhadap berbagai produk Perda sebagai akibat terjadinya perubahan. Pada masa mendatang diperkirakan masih akan banyak Perda dan produk hukum lainnya yang harus disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan antara satu dan lainnya. Persoalan sinkronisasi produk Perda provinsi dengan Kabuapten/Kota juga perlu dicermati, sehingga tidak berbenturan satu sama lainnya, atau bahkan saling bertentangan secara prinsip, sehingga yang pada akhirnya produk-produk hukum tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.
4. Kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, masih perlu ditingkatkan. Kemampuan ini termasuk dalam hal memahami serta berperilaku responsif terhadap persoalan gender. Kebutuhan peningkatan kapasitas ini tidak terlepas dari belum mantapnya sistem yang ada, sehingga berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum yang ada.
5. Organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung sampai tahun 2006 masih diatur dengan peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang diberlakukan pada tahun 2000. Meskipun peraturan pemerintah tersebut telah diganti pada tahun 2003, namun peraturan daerah yang mengatur perangkat daerah tersebut masih tetap diberlakukan. Alasan Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan perangkat daerah dengan prinsip "miskin struktur kaya fungsi" seperti yang diatur dalam peraturan daerah tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, karena pemerintah pusat ternyata masih mengevaluasi kembali

peraturan pemerintah tahun 2003, sehingga membingungkan pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Hasil evaluasi Pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam rangka menindaklanjuti/melaksanakan peraturan pemerintah dimaksud, saat ini dilakukan proses penyiapan modal hukum dasar dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah sesuai maksud peraturan pemerintah tersebut.

6. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2005 mempunyai aparatur berjumlah 7.743 orang, terdiri atas laki-laki 5.333 orang (68,88%), dan wanita 2.410 orang (31,12%). Berdasarkan latar belakang pendidikannya, PNS Pemerintah Provinsi Lampung masih didominasi lulusan Sekolah Lanjutan Atas yaitu sebanyak 3.352 orang (44,22%). Sedangkan jumlah PNS yang telah menyelesaikan program Doktor atau S-3 hanya 4 orang (0,05%). Jabatan struktural pada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah diisi mencapai 905 buah. Sebagian besar jabatan struktural tersebut, yakni 68,7%, diduduki oleh pejabat eselon IV A. Secara keseluruhan PNS yang menduduki jabatan struktural mencapai 11,93%, sedangkan PNS yang menduduki jabatan fungsional mencapai 10,38%, dan sisanya adalah PNS Non Struktural. Sebagian besar PNS, yakni sebanyak 4.987 orang (65,78%) berada pada golongan III, sebanyak 1996 orang (26,32%) berada pada golongan II; 502 (6,62%) orang berada pada golongan IV, dan sisanya 96 orang (1,26%) berada pada golongan I.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai lini organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah terus mengalami penguatan. Pada tahun 2005 terdapat 1.986 Desa, 174 Kelurahan, dan 180 Kecamatan.

8. Dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil beberapa kebijakan yaitu : melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai; pengaktifan Gerakan Disiplin Nasional (GDN); serta penghargaan bagi PNS yang memasuki purna bhakti.
9. Salah satu upaya untuk menciptakan aparatur yang bersih adalah mengefektifkan pelaksanaan pengawasan. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional (Bawasda) pada tahun 2005 telah berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp. 5,8 Miliar.

#### **2.1.8 Wilayah dan Tata Ruang**

1. Kondisi topografi Daerah Lampung terbagi dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu : (a) daerah topografi berbukit sampai bergunung; (b) berombak sampai bergelombang; (c) dataran *alluvial*; (d) dataran rawa pasang surut; (e) daerah aliran sungai (*river basin*). Terdapat 69 buah pulau-pulau besar dan kecil, diantaranya terdapat 49 buah pulau di Kabupaten Lampung Selatan dengan pulau-pulau terbesar, yaitu di Pulau Sebesi (2.472 Ha), Pulau Legundi (1.820 Ha), Pulau Sebuk (1.771 Ha), Pulau Rakata (1.343 ha), dan Pulau Sertung dan gugusan kepulauan Krakatau (1.057 Ha), serta Pulau Pahawang (669 Ha). Di Kabupaten Lampung Barat terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Pisang (142 Ha) dan Pulau Butuah (63 Ha). Di Kabupaten Tanggamus terdapat 10 pulau dan yang terbesar adalah Pulau Tabuan (19.374 Ha), serta di Kota Bandar Lampung sebanyak 1 (satu) buah pulau yaitu Pulau Pasaran (6 Ha).
2. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 1964, luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.528.835 Ha. Dengan rincian penggunaan lahan

terdiri atas perkampungan seluas 245.931 Ha (7,45%), sawah 290.824 Ha (8,81%), tegalan/ladang 676.824 Ha (20,50%), perkebunan 690.803 Ha (20,92%), kebun campuran 366.419 Ha (1,90%), alang-alang 89.476 Ha (2,71%), hutan 833.847 Ha (25,26%), rawa dan danau 15.692 Ha (0,48%), tambak 42.251 Ha (1,28%) dan penggunaan lahan lainnya 49.478 Ha (1,50%). Sedangkan menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas wilayah Provinsi Lampung adalah 3.301.545 Ha dengan penggunaan lahannya terdiri atas perkampungan 248.109 Ha (7,51%), sawah 284.664 Ha (8,26%), tegalan/ladang 675.860 Ha (20,47%), perkebunan 703.945 Ha (21,32%), kebun campuran 227.866 Ha (6,90%), alang-alang 90.164 Ha (2,73%), hutan 1.004.735 Ha (30,43%), rawa dan danau 15.591 Ha (0,47%), tambak 33.844 Ha (1,03%), dan penggunaan lainnya 16.767 Ha atau 0,51%.

3. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh rumah tangga pertanian di Provinsi Lampung sebesar 1,08 hektar; yang berarti lebih rendah dari rata-rata Sumatera (1,33 hektar) dan Luar Jawa (1,31 hektar); tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata di Jawa (0,41 hektar) dan nasional (0,81 hektar). Jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar atau petani gurem mencapai 26,62%.

#### **2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung menurut SK Menhutbun Nomor : 256/KPTS/II/2000 dan Perda Nomor 5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung tercatat seluas 1.004.735 Ha (BPS, 2003) atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung. Menurut statusnya, luas areal kawasan hutan ini

terdiri atas : Hutan lindung seluas 317.615 Ha (31,6%), Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 462.030 Ha (46%), Hutan Produksi Terbatas 33.358 Ha (3,32%) dan Hutan Produksi Tetap 191.732 Ha (19%). Hampir sebagian besar wilayah kawasan hutan tersebut sudah terbuka menjadi areal budidaya terutama untuk perkebunan kopi. Diperkirakan areal hutan efektif sesuai fungsinya masih tersisa 50 - 60 %. Berdasarkan hasil citra landsat tahun 2000, kawasan Hutan Lindung telah mengalami kerusakan 80%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 43%, Hutan Produksi 76,74%, dan Hutan Produksi Terbatas 76,34%.

2. Secara geografis Daerah Lampung memiliki 5 (lima) River Basin atau Daerah Aliran Sungai (DAS). Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Lima River Basin tersebut yaitu : DAS Tulang Bawang; DAS Seputih; DAS Sekampung; DAS Semangka; dan DAS Way Jepara. Secara hidrogeologis daerah Lampung memiliki 7 (tujuh) Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu : CAT Bandar Lampung; CAT Kalianda; CAT Metro-Kotabumi; CAT Talang Padang; CAT Kota Agung; CAT Danau Ranau; dan CAT Gedong Meneng.
3. Mengingat kondisi vegetasi di daerah tangkap air yang terus tergradasi dan berubah fungsinya sehingga tidak mampu berfungsi optimal sebagai daerah penangkapan dan penyimpan air, maka sumber daya air di Provinsi Lampung semakin berkurang dan berfluktuasi. Kondisi ini tampak dari sifat-sifat sebagian besar sungai di Lampung yang banjir pada musim hujan dan kering pada saat musim kemarau.
4. Berdasarkan ketentuan perundangan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat 4), Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai

ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Secara geografis Provinsi Lampung memiliki panjang garis pantai 1.105 km, termasuk 69 pulau kecil dan besar. Luas wilayah pesisir dan pantai diperkirakan  $\pm 16.625,3 \text{ km}^2$  laut.

5. Berdasarkan peta geologi daerah Lampung, dapat diinventarisasi adanya bahan-bahan tambang (endapan mineral) diantaranya : mineral logam seperti emas, perak, mangan, biji besi dan pasir besi; mineral industri dan konstruksi seperti : zeolit, pasir kuarsa, felspar, lempung serta marmer, granit, dan andesit; endapan uranium; batu bara; dan minyak bumi.
6. Provinsi Lampung memiliki 13 potensi panas bumi, baik sebagai *solfatara*, *fumarola*, maupun lumpur panas. Potensi panas bumi yang layak dikembangkan terdapat di Ulu Belu, Suoh, Gunung Sekincau, Gunung Rajabasa, dan Danau Ranau.
7. Potensi sumber daya air di sungai dan sumber mata air tergantung pada kemampuan daerah tangkap sungainya (*cathment area*), yang sebageian besar merupakan kawasan lindung atau suaka alam. Potensi sumber daya air terutama berada pada lokasi kawasan hutan di Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Selatan untuk sungai-sungai Sekampung, Seputih, Semangko, dan Tulang Bawang.

## 2.2. TANTANGAN

### 2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Jumlah penduduk yang akan mencapai 8 - 9 juta pada masa 20 tahun ke depan, Provinsi Lampung yang makin besar membawa konsekuensi tantangan sebagai berikut : kemampuan menyediakan secara memadai berbagai fasilitas kebutuhan dasar bagi penduduk; menciptakan penyebaran dsan pemerataan



penduduk ke sentra ekonomi sehingga tidak terjadi dampak negatif kesenjangan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah; mengintegrasikan berbagai budaya yang berasal dari berbagai suku menjadi perekat kesatuan dan mempertahankan keragaman etnis yang menjadi jati diri Lampung sebagai Indonesia mini sehingga perbedaan suku tidak berkembang menjadi energi negatif yang bersifat destruktif dan anarkis; memberikan peluang kesetaraan gender; serta mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.

2. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tantangan pada bidang kesejahteraan masyarakat, yakni : kecenderungan peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin jika penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
3. Meskipun pada tahun 2005 nilai IPM mencapai 66,8 (menengah atas), akan tetapi sebagian besar penduduk (>50%) mempunyai tingkat pendidikan yang rendah atau hanya sekolah dasar, sehingga dalam jangka panjang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Secara umum kualitas tenaga serta sarana dan prasarana pendidikan belum cukup dan belum merata, khususnya laboratorium. Kurikulum pendidikan yang masih sering berubah secara nasional juga mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah. Adanya paham pada masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah beban yang menghabiskan anggaran, bukan investasi modal. Belum sinergisnya pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan. Belum terkoordinasinya dan sinkronisasinya pembangunan pendidikan antara pusat dan daerah.

4. Tantangan di bidang kesehatan adalah : Penyebaran tenaga kesehatan belum merata; sarana dan prasarana kesehatan di setiap Kabuapten/Kota masih kurang; serta belum tersedianya *data base* yang memadai dan *up to date*. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih sangat kurang; kondisi geografis menyebabkan beberapa kabupaten sulit terjangkau oleh tenaga kesehatan; serta posisi Lampung yang cukup strategis, yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa memberikan dampak resiko penyebaran berbagai penyakit menular;
5. Tantangan di bidang kesejahteraan keluarga Masyarakat Lampung adalah Proyeksi tingkat kesejahteraan keluarga dalam periode 20 tahun mendatang memperlihatkan bahwa jumlah KK akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Meskipun pada rentang waktu 20 tahun ke depan, proporsi Keluarga Pra Sejahtera dengan alasan ekonomi juga mengalami peningkatan dengan persentase mencapai 24,60%. Peningkatan juga terjadi pada Keluarga Sejahtera 1 alasan ekonomi, dimana pada tahun 2025 menjadi 17,98%. Pada Keluarga Sejahtera 1 alasan non ekonomi mencapai 13,8%. Sebaliknya, jumlah Keluarga Pra Sejahtera alasan non ekonomi justru mengalami penurunan sehingga pada tahun 2025 tinggal 8,39% . Adanya peningkatan proyeksi peningkatan, baik jumlah maupun proporsi Keluarga Pra Sejahtera dalam periode 20 tahun ke depan akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh masyarakat Lampung. Sehingga diperlukan adanya suatu upaya lebih, sinergi dan kerja sama dari semua aspek dan lini kehidupan di Provinsi Lampung untuk mengurangi dampak dari peningkatan tersebut sehingga tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar.

6. Tantangan pembangunan perempuan ke depan adalah meningkatkan kualitas perempuan di berbagai bidang pembangunan, menurunkan tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi dan diskriminasi. Begitu pula tantangan bagi pembangunan anak adalah menurunkan tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, serta eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak-anak. Pengarusutamaan gender akan menjadi perhatian semua *stakeholder* dan masyarakat internasional. Peran perempuan dimulai dari peran dalam keluarga dalam membentuk keluarga anggota tangguh. Peran ibu dalam membentuk karakter anak akan mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga keluarga harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
7. Pada era globalisasi tantangan utama berasal dari kegiatan perdagangan bebas, dimana mobilitas berbagai sumber daya menghadapi hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk antardaerah dan angkatan kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Provinsi Lampung secara keseluruhan. Karena globalisasi mendorong ke arah kondisi hilangnya batas geografi (*borderless*), penyebaran informasi menjadi tidak terbatas juga. Penyebaran informasi ini terjadi melalui berbagai media terutama media TV satelit dan internet. Akibat dari pertukaran informasi yang cepat akan mempengaruhi pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk pola perilaku dalam kehidupan keseharian. Pada sisi lain, globalisasi dalam bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas, akan

memberikan tekanan kepada masyarakat Lampung agar menjadi lebih berdaya saing dalam berwirausaha. Selain perlu adanya pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan *self support*, pengembangan potensi keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan sebagai dasar pengembangan kesejahteraan masyarakat.

8. Pada era globalisasi semakin banyak tenaga pengajar (guru dan dosen) yang berasal dari luar negeri yang bebas mengajar di Indonesia, sehingga menjadi kompetitor berat bagi SDM pendidikan dari dalam negeri. Selain itu meningkatnya rumah sakit yang berasal dari luar negeri dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat modern; serta persaingan dengan tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri akan semakin ketat dan bersaing. Dengan lancarnya komunikasi, informasi dan transportasi industri pariwisata akan berkembang. Ekse yang akan diterima adalah tingginya penetrasi budaya asing dengan nilai yang tidak sesuai dengan budaya nasional dan daerah. Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat aditif) akan meningkat jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

### **2.2.2 Ekonomi**

1. Pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun demikian terdapat sejumlah tantangan yaitu : sektor pertanian masih tetap mendominasi perekonomian terhadap pembentukan PDRB; peranan konsumsi domestik masih sangat tinggi; pertumbuhan investasi masih lambat; proses transformasi industri belum optimal; pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor belum optimal, serta masih terdapat banyak peraturan perizinan dan peraturan

lainnya yang tidak bersahabat dengan dunia usaha. Kondisi paradok juga terjadi disamping angka kemiskinan tinggi mencapai 22,2% dan pengangguran 6,2%, sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh di atas dua puluh persen, sementara pertumbuhan PDRB masih di bawah 5% atau rata-rata nasional.

2. Pada sisi lain, tantangan yang muncul dan dapat mempengaruhi nilai PDRB adalah instabilitas sosial politik, tingginya suku bunga dan fluktuasi nilai tukar rupiah yang berjalan dengan rezim bebas, serta inflasi yang tidak terkendali.
3. Pada kondisi jumlah penduduk mencapai 8-9 juta, dengan rasio penduduk usia produktif mencapai tingkat maksimal, serta komposisi pendidikan angkatan kerja mencapai SMP dan SMU, maka tantangannya adalah perekonomian dituntut untuk tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang memadai.
4. Globalisasi ekonomi merupakan tantangan yang berat dalam persaingan antardaerah dan antarnegara untuk menarik investasi, baik dari modal asing maupun domestik. Tantangan berat juga berasal dari kegiatan perdagangan bebas. Dimana mobilitas berbagai sumberdaya menghadapi hambatan yang semakin kecil. Pada situasi ini, dengan tingkat mobilitas penduduk antar daerah dan antar negara menjadi tinggi, maka jika kualitas tenaga kerja secara teknis rendah akan berakibat pada rendahnya daya saing tenaga kerja, pada gilirannya akan sangat merugikan Provinsi Lampung secara keseluruhan.
5. Karena globalisasi mendorong kearah kondisi hilangnya batas geografi (borderless), penyebaran informasi menjadi tidak terbatas juga. Penyebaran informasi ini terjadi melalui berbagai

media terutama media TV satelit dan internet. Akibat dari pertukaran informasi yang cepat akan mempengaruhi pembentukan pola pikir masyarakat, yang pada akhirnya akan membentuk pola perilaku dalam kehidupan keseharian. Globalisasi dalam bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas, akan memberikan tekanan kepada masyarakat Lampung agar menjadi lebih berdaya saing dalam berwirausaha. Selain perlunya adanya pengembangan jiwa kewirausahaan, kemandirian, dan self support, pengembangan potensi keunggulan komparatif lokal dapat dikembangkan sebagai dasar pengembangan kesejahteraan masyarakat.

6. Kebijakan yang tidak terpadu dan sinergis antar Provinsi, dan antar Kabupaten/Kota dalam pelayanan investasi akan menjadi kendala masuknya investasi. Selain itu, iklim investasi yang belum kondusif, antara lain kepastian hukum yang berkaitan dengan tanah, birokrasi, serta mekanisme dan prosedur investasi, merupakan kelemahan utama yang menghambat investasi langsung. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak mendukung (kontra produktif) terhadap investasi.
7. Tantangan dalam bidang keuangan daerah adalah : masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak; belum banyak tergalinya berbagai sumber pendapatan; perlunya peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah; serta penggalan kontribusi perusahaan besar terhadap pembangunan daerah. Namun prinsip mendahulukan pengembangan PDRB kemudian pengertian PAD tidak dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
8. Tantangan utama dalam produksi pangan adalah ketidakpastian musim; peningkatan efisiensi produksi pangan di negara-negara sekitar Indonesia; masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil

pertanian, karena tingkat kesuburan dan teknik budidaya yang kurang tepat; aturan ecolabeling dari negara-negara pengimpor produk pertanian; endemi dan pandemi penyakit; pencurian hasil laut dari perairan daerah; penyediaan bibit atau benih bermutu; serta keberlanjutan produksi dan produktivitas komoditas spesifik unggulan lokal. Tantangan paling serius yang mengancam keberlanjutan produksi pertanian, khususnya pangan, adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah, akibat kompetisi penggunaan lahan ke non pertanian, serta meningkatnya jumlah petani gurem.

9. Pada bidang UKM, tantangan meliputi kemampuan membaca peluang pasar, manajemen keuangan, budaya kerja, pola dan teknik produksi yang belum mampu untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kualitas dan persyaratan standarisasi pasar domestik dan internasional; rendahnya kemampuan mengakses terhadap modal usaha; efisiensi produksi serta ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan meningkatnya *un-fair competition* seperti praktik dumping dan tindakan unilateral proteksi.
10. Tantangan pada bidang pertanahan adalah : banyaknya tumpang tindih sertifikat tanah atas lahan tertentu; penegakan hukum yang tegas di bidang pertanahan belum berjalan dengan baik; ancaman penyerobotan lahan terutama pada kawasan hutan lindung dan konservasi; rendahnya tertib administrasi pertanahan.

### **2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

1. Dalam kerangka menghadapi perkembangan ekonomi global berbasis pengetahuan, persaingan akan semakin tinggi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan

ipteks. Dalam rangka meningkatkan kemampuan ipteks nasional, peranan daerah sangat diharapkan, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi ipteks mulai dari perencanaan hingga implementasi hasil riset dan pengembangan.

2. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar , kesehatan dan pendidikan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan ipteks dengan kebijakan sektor lain; meningkatkan komitmen dan budaya bangsa terhadap pengembangan ipteks, mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya ipteks, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan ipteks.
3. Tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teleditas pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan E-Government.

#### **2.2.4 Sarana dan Prasarana**

1. Tantangan dalam bidang sarana dan prasarana pengairan dan penyediaan air baku adalah; peningkatan pasokan air baku untuk irigasi dan air bersih; terjadinya peningkatan kerusakan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi; optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air; penurunan kualitas potensi sumberdaya air; sumberdaya manusia pengelola irigasi masih lemah; perlunya pengelolaan Satuan Wilayah Sungai (SWS) secara terpadu antara hulu-hilir; perda yang mendukung Pengelolaan



Lingkungan dan SDA belum lengkap; kerusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai; serta peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan sumber air. Tantangan paling serius adalah adanya alih fungsi lahan irigasi/rawa yang terus bertambah dan berkurangnya jumlah curah hujan dari rata-rata 2000 mm/th menjadi 1800 mm/th.

2. Pada infrastruktur jalan, tantangan meliputi kualitas dan daya dukung yang relatif masih rendah; penurunan kondisi jaringan jalan sebagai akibat dari kualitas konstruksi jalan yang rendah; menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk biaya pemeliharaan jalan; belum seluruh jalan Lintas terhubung dengan feeder roads; masih banyak terdapat daerah berpotensi ekonomi yang belum dapat dilayani oleh prasarana jalan; serta terjadinya kemacetan dan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan di kawasan perkotaan. Selain itu, kondisi prasarana dan investasi di daerah, terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi; perlunya peningkatan penegakan disiplin pengguna jalan; serta adanya ketidakseimbangan moda transportasi massal darat dengan moda transportasi massal laut dan udara.
3. Tantangan pada infrastruktur transportasi meliputi : perlunya strategi pemanfaatan sistem infrastruktur agar Provinsi Lampung berkembang menjadi pusat pelayanan barang dan jasa bagi Indonesia wilayah barat, ASEAN, global; serta perlunya pengembangan teknologi transportasi terpadu antarmoda dan intramoda yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu perlu dikembangkan kapasitas kelembagaan, peraturan, dan iklim kompetisi yang sehat dalam pelayanan transportasi publik.

4. Tantangan prasarana pemukiman meliputi upaya mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh; peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana permukiman (air bersih, kesehatan lingkungan, dan jalan lingkungan); pengembangan subsidi sektor perumahan melalui kredit lunak; serta perlunya peningkatan fungsi daerah perkotaan (urban) sebagai penggerak pembangunan suburban atau hinterland dan daerah pedesaan.
5. Pada era globalisasi, tantangan bidang pos dan telematika adalah semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, perlu peningkatan dan penyebaran arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika bagi masyarakat; perlunya percepatan arus informasi pembangunan guna pengembangan daerah melalui pemanfaatan E-Government berbasis IT menuju terciptanya Good Governance.
6. Tantangan energi adalah perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif dalam rangka pengembangan pembangkit tenaga listrik, terutama di pedesaan; pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan; perlunya pembiayaan kompetitif dan insentif bagi pembiayaan dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama Bahan Bakar Nabati (BBN).

#### **2.2.5 Politik**

1. Beranekaragamnya penduduk Lampung dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik. Perubahan situasi politik nasional memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan politik di daerah.
2. Tantangan terberat dalam 20 tahun ke depan adalah menjaga konsolidasi politik secara berkelanjutan, berupa reformasi

struktur politik; penyempurnaan proses politik; pengembangan budaya politik yang lebih demokratis. Tantangan lain adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

3. Tantangan lain adalah bagaimana melembagakan, kebebasan pers/media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Akses masyarakat yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik.

#### **2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban**

1. Keragaman etnis yang tinggi memunculkan kerawanan berupa konflik bernuansa SARA. Selain itu, dampak daripada globalisasi dan era informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat.
2. Mengingat posisi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekat dengan pusat Pemerintahan memberikan potensi yang tinggi bagi munculnya gangguan stabilitas daerah seperti : terorisme, penyebaran NAPZA dan kriminalitas.

#### **2.2.7 Hukum dan Aparatur**

1. Tantangan dalam bidang hukum adalah masih terdapat berbagai produk hukum yang tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya; masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat; serta kurangnya independensi kelembagaan hukum, khususnya aparat penegak hukum di tingkat daerah.

2. Perlunya peningkatan kesadaran penegakkan supremasi hukum di masyarakat; serta upaya menghapuskan kasus main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat. Disamping itu, memberikan peran kepada lembaga-lembaga adat untuk menyadarkan anggotanya dalam penegakkan hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
3. Perlunya struktur kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif; pengembangan pemerintahan berorientasi kewirausahaan yang didukung oleh aparatur yang profesional dan kreatif, serta menguasai dan mampu memanfaatkan TI dalam bentuk *e-Government* untuk menghasilkan pelayanan publik lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah, serta mendukung penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan ini akan merespon desakan *stakeholder* akan perlunya dikembangkan pemerintahan yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneuring government*).
4. Tantangan lain adalah perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat desa/kelurahan.

#### **2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang**

1. Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi; penataan tata ruang dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antar daerah. Melalui pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah berdasarkan keunggulan lokal, dalam rangka mendukung daya saing nasional.

#### **2.2.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman, yakni : krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Oleh karena itu perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.
2. Tantangan yang riil di daerah adalah perusakan hutan dan berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sampai pada taraf yang membahayakan; serta adanya degradasi kawasan hutan dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar. Tantangan terbesar lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari.
3. Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberikan ancaman terjadinya kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat pada menurunnya ketahanan air tanah.

4. Pada sisi lain, pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut.
5. Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal. Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati.
6. Adanya ancaman global diberlakukannya *ekolabel* bagi produk-produk primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan.